

STRATEGI DINAS PERHUBUNGAN DALAM PENERTIBAN PARKIR DI KOTA WISATA BUKITTINGGI

Rizki Fadel Afifi^{1(a)}, Syamsir^{2(b)}

^{1,2}Departemen Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang

^{a)}rizkifadelafifi04@gmail.com, ^{b)}syamsirsaili@yahoo.com

INFORMASI ARTIKEL

Article History:

Dikirim:

22-07-2024

Diterbitkan Online:

01-09-2024

Kata Kunci:

Strategi, Penertiban Parkir, Kota Wisata Bukittinggi

Keywords:

Strategy, Parking Control, Bukittinggi Tourism City

Corresponding Author:

rizkifadelafifi04@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi strategi yang diterapkan oleh Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi dalam menertibkan parkir di kawasan wisata kota tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dan dilaksanakan di Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, dan dianalisis menggunakan metode SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan meliputi penyediaan sarana dan prasarana parkir, penguatan sumber daya manusia, serta sosialisasi kepada masyarakat. Namun, terdapat beberapa faktor penghambat yang menyebabkan strategi ini belum terlaksana secara optimal, antara lain kurangnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan parkir, ketidakdisiplinan petugas, serta keterbatasan wewenang dinas perhubungan dalam menindak pelanggaran parkir. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa meskipun Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi telah berupaya mengatasi hambatan-hambatan yang ada, strategi yang diterapkan masih perlu ditingkatkan untuk mencapai hasil yang lebih maksimal.

ABSTRACT

This research aims to identify the strategies implemented by the Bukittinggi City Transportation Agency in curbing parking in the city's tourist areas. This research used a qualitative and descriptive approach and was conducted at the Bukittinggi City Transportation Agency. Research informants were selected using a purposive sampling technique. Data were collected through observation, interviews, and documentation and analyzed using SWOT. The results showed that the strategies carried out by the Transportation Agency include providing parking facilities and infrastructure, strengthening human resources, and socializing with the community. However, several inhibiting factors cause this strategy not to be implemented optimally, including the lack of public awareness to comply with parking regulations, officer indiscipline, and the limited authority of the transportation agency in taking action against parking violations. This research concludes that although the Bukittinggi City Transportation Office has tried to overcome the existing obstacles, the strategies implemented still need to be improved to achieve maximum results.

DOI:

<https://doi.org/10.24036/publicness.v3i3.219>

PENDAHULUAN

Parkir dapat diartikan sebagai tempat pemberhentian kendaraan dalam jangka waktu tertentubagi mobil, sepeda motor, dan jenis kendaraan lainnya, tergantung pada permintaan pemilik kendaraan. Parkir menjadi hal yang

mempengaruhi pada sistem transportasi umumnya. Hampir disetiap daerah dan kota di Indonesia terdapat fenomena parkir ini.

Penertiban parkir merupakan alat manajemen kebutuhan lalu lintas yang biasa digunakan untuk mengendalikan kendaraan

yang akan menuju suatu kawasan ataupun perkantoran tertentu sehingga dapat diharapkan akan terjadi peningkatan kinerja lalu lintas di kawasan tersebut (Muslim, M., & Lubis, B, 2023). Upaya Penertiban parkir sangat penting untuk menggunakan strategi yang tepat karena melibatkan pengaturan dan pengawasan area parkir untuk memastikan penggunaan yang efisien dan tertib. Ini termasuk penegakan aturan parkir, pemasangan rambu-rambu, penggunaan teknologi seperti sensor parkir, dan sistem denda untuk pelanggaran. Tujuannya adalah mengurangi kemacetan, meningkatkan aksesibilitas, dan menjaga ketertiban di area parkir.

Sistem manajemen lalu lintas sering kali mengalami masalah parkir. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. 272/HK.105/DRJD/96 terkait Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir, parkir merupakan keadaan suatu kendaraan tidak bergerak yang sifatnya tidak sementara. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, parkir merupakan suatu kendaraan berhenti atau berhenti bergerak beberapa saat dan ditinggalkan oleh pengemudinya.

Strategi dapat diartikan sebagai suatu tindakan penyesuaian yang dilakukan secara sadar dan berdasarkan pertimbangan yang masuk akal untuk menyikapi situasi lingkungan tertentu yang dianggap penting itulah yang dimaksud dengan strategi. Strategi dirancang sedemikian rupa sehingga memberi gambaran apa yang sedang dan akan dilakukandalam mencapai tujuan yang telah dirumuskan oleh suatu organisasi untuk dicapai (Budiono, 2019).

Tingginya tingkat mobilitas di kota Bukittinggi sebagai kota wisata yang ramai dikunjungi para pendatang dan pengunjung terutama pada hari libur dan akhir pekan diiringi dengan kurangnya kesiapan lahan parkir dan pengelolaannya di beberapa wilayah. Kebutuhan untuk tempat parkir yang lebih aman dan tertib sangat diperlukan, namun ada beberapa oknum yang memanfaatkan berbagai lahan atau tempat tertentu yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib (Zwespa et al., 2021). Pelaksanaan Penertiban parkir yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi sebagai aparat pemerintah dalam menjalankan tugasnya dalam permasalahan parkir belum berjalan dengan semestinya dan masih ditemui beberapa

masalah-masalah yang menyangkut terkait perparkiran di Kota Bukittinggi.

Masih terbatasnya jumlah titik parkir di wilayah Kota Bukittinggi menyebabkan belum meratanya lokasi parkir di setiap wilayah yang membuat tidak seimbang dengan jumlah kendaraan yang ada di Kota Bukittinggi. Peraturan parkir pinggir jalan sering disalahpahami oleh masyarakat umum, padahal pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menyediakan pelayanan publik. Masyarakat justru meninggalkan kendaraannya sembarangan dan memanfaatkan jalan yang tidak boleh dijadikan tempat parkir kendaraannya.

Dalam Penertiban perparkiran di kota Bukittinggi masih terdapatnya beberapa masalah diantaranya masih terdapat pelanggaran parkir yang terjadi di Kota Bukittinggi masih terjadi karena beberapa faktor seperti masyarakat yang tidak mengindahkan peraturan parkir yang telah dibuat, kondisi ini dipengaruhi dengan adanya titik parkir yang disebabkan oleh toko yang tidak memiliki izin yang menjadi badan jalan sebagai lahan parkir dengan juru parkir yang kurang disiplin dalam mengelola lokasi parkir tersebut. Hal ini dikarenakan oleh kurangnya pengawasan personil pada kawasan parkir saat kebutuhan parkir meningkat. Kawasan ini akan menjadi wilayah rawan kemacetan dan pelanggaran parkir yang akan menyebabkan permasalahan pada penertiban parkir.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Satori dan Komariah (2014:22) menyatakan bahwa penelitian kualitatif mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah. Lokasi penelitian ini adalah di Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini mencakup data primer dan data sekunder. Untuk menguji keabsahan data, peneliti menggunakan triangulasi sumber. Tahapan analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi Dinas Perhubungan dalam Penertiban Parkir di Kota Bukittinggi

Strategi Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi dalam penertiban parkir merupakan pendekatan terencana untuk mengatur dan mengelola penggunaan ruang parkir dalam sebuah kota atau wilayah. Isu-isu yang memperoleh tingkat strategis yang sangat tinggi telah diidentifikasi dan kemudian diperumuskan strategi untuk mengelola isu-isu tersebut. Isu-isu strategis ini diidentifikasi melalui tes litmus yang memfokuskan pada isu-isu yang memiliki tingkat strategis yang sangat tinggi (M. Wafiq et al., 2024). Strategi Dinas Perhubungan dalam penertiban parkir dapat berupa menetapkan aturan mengenai perparkira, sosialisasi kepada masyarakat, serta menyediakan berbagai fasilitas yang lengkap terhadap parkir. Untuk mengetahui pelaksanaan strategi terdapat tiga tahapan proses strategi menurut David dalam (Maruf, 2019) diantaranya :

Perumusan Strategi

Perumusan strategi merupakan langkah awal yang mesti dilakukan agar strategi yang di rancang dan diterapkan nantinya dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Perumusan strategi penertiban parkir oleh Dinas Perhubungan melibatkan beberapa langkah kunci untuk mengatur dan mengelola parkir dengan efektif di suatu wilayah. Adapun perencanaan yang strategi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi berupa pembentukan Perda no 3 Tahun 2010 mengenai pengelolaan perparkiran mencakup regulasi tentang lokasi parkir, tarif parkir, waktu operasional parkir, jenis kendaraan yang diizinkan, dan sanksi bagi pelanggar.

Implementasi Strategi

Pelaksanaan strategi dapat berupa pengorganisasian tim pelaksana yakni dengan adanya UPTD Terminal dan Parkir yang bertanggungjawab langsung kepada kepala dinas. Unit ini terdiri dari personel yang kompeten, terlatih, sertamempunyai pengetahuan tentang masalah parkir dan regulasi yang berlaku. Personel yang dimiliki oleh UPTD akan menjalankan jalannya strategi dengan baik, hal ini berupa pengaturan di tempat parkir dengan memastikan jalannya sesuai dengan peraturan yang berlaku dan

penempatan petugas parkir di lokasi-lokasi strategis.

Mencermati instansi-instansi yang dilibatkan dalam koordinasi oleh Dishub, semuanya merupakan instansi yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab dalam urusan menjaga tata tertib dan keamanan masyarakat (Madeleine et al., 2022). Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yakni pemerintah kota Bukittinggi membentuk sebuah tim yang melibatkan berbagai instansi terkait dalam pengamanan dan penertiban kota yaitu tim SK4. Berdasarkan hasil penelitian yang didapat dinas perhubungan juga memastikan infrastruktur parkir yang diperlukan siap digunakan. Ini termasuk membangun atau memperbaiki tempat parkir, mengatur garis pembatas, memasang tanda-tanda peringatan atau pengumuman aturan parkir, serta memperbaiki sistem pembayaran parkir yang ada.

Disamping itu dalam memastikan strategi berjalan dengan semestinya dinas perhubungan juga ingin masyarakat memiliki kesadaran dalam mendukung penertiban yang telah dilakukan berupa melakukan kampanye sosialisasi yang luas kepada masyarakat mengenai kebijakan baru yang akan diterapkan. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui media massa, langsung turun ke lapangan, atau menggunakan media sosial untuk mencakup khalayak yang lebih luas.

Evaluasi dan Pengawasan

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi selalu memonitoring strategi yang diterapkan telah berjalan semestinya diantaranya dengan melakukan evaluasi rutin kepada setiap personil baik pengawas maupun petugas parkir. Melalui evaluasi yang sistematis dan berkelanjutan terhadap personil dan petugas parkir, Dishub dapat memastikan bahwa mereka mampu memberikan layanan parkir yang berkualitas, meningkatkan kepatuhan terhadap aturan parkir, dan memberikan kontribusi yang signifikan.

Hambatan Penertiban Perparkira di Kota Bukittinggi

Implementasi kebijakan pengelolaan parkir mempunyai berbagai hambatan yang mempengaruhi pelaksanaannya kepada masyarakat. Gow dan Morss dalam Pasolong (2010:59) mengungkapkan hambatan-hambatan tersebut jika dikaitkan dengan

hambatan pengelolaan perparkiran oleh Dinas Perhubungan di Kota Bukittinggi antara lain:

- a. Kurangnya dukungan atau feedback yang bekesinambungan oleh masyarakat karena masih banyaknya ditemui masyarakat pengguna parkir yang kurang tertib dalam memarkirkan kendaraannya;
- b. Kurangnya ketidakmampuan sumber daya manusia, seperti masih ditemui para petugas parkir yang kurang tertib;
- c. Lemahnya monitoring atau evaluasi yang dilakukan kepada personil maupun sosialisasi kepada masyarakat mengenai parkir yang tertib.

Upaya Solusi dalam Mengatasi Hambatan

Menurut Bambang Sunggono (1994) dalam pengelolaan penertiban parkir sendiri terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi agar suatu kebijakan dapat terealisasi dengan baik, yaitu :

- a) Peraturan hukum atau kebijakan itu sendiri
Berdasarkan hasil penelitian yang didapat terkait dengan upaya /solusi dalam penertiban parkir pemerintah kota bukittinggi telah mengeluarkan peraturan yang jelas mengenai perparkiran yaitu Perda no 3 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Perparkiran. Peraturan yang telah dibuat dapat menetapkan aturan yang jelas tentang lokasi, waktu, tarif , sanksi dan cara parkir yang diperbolehkan. Misalnya, menetapkan zona parkir, durasi maksimum parkir, dan larangan parkir di tempat-tempat tertentu seperti trotoar atau persimpangan.
- b) Mentalitas petugas
Berdasarkan hasil penelitian untuk memaksimalkan terwujudnya keamanan dan ketertiban perparkiran pemerintah Kota Bukittinggi membentuk tim SK4, tim ini merupakan bentuk kolaborasi antara polisi, tentara, kejaksaan, dishub dan instansi terkait lainnya agar dapat bekerja sama serta bertanggungjawab dalam memberikan ketertiban perparkiran, maka dengan keterbatasan cakupan masing-masing petugas dengan tim ini bisa menjadi lebih fleksibel dan dapat menjaga keseimbangan antara penerapan aturan, pelayanan masyarakat, dan penghormatan terhadap nilai-nilai keadilan dan profesionalisme.

c) Fasilitas

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi sudah menyediakan berbagai fasilitas yang diperlukan dalam mendukung ketertiban parkir sesuai dengan aturan hukum yang berlaku baik berupa infrastruktur yang diperlukan seperti tanda peringatan, marka jalan yang jelas, sistem manajemen parkir berbasis teknologi, pendidikan masyarakat tentang aturan parkir, kerjasama lintas sektor dalam penegakan hukum, serta fasilitas administratif untuk pengelolaan dan pelaporan pelanggaran.

d) Warga masyarakat sebagai objek

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat dilihat bahwa masyarakat pengguna merupakan sebagai obyek dalam penertiban parkir memainkan peran kunci dalam menciptakan lingkungan parkir yang teratur, aman, dan tertib. Oleh karena itu Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi mengajak kepada masyarakat untuk selalu taat peraturan dengan melakukan sosialisasi diharapkan dapat membangun kesadaran masyarakat untuk patuh terhadap aturan parkir yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah atau otoritas terkait. Ini mencakup mematuhi larangan parkir di tempat-tempat tertentu, mengikuti batas waktu parkir, atau menggunakan ruang parkir yang telah ditentukan.

Analisis SWOT

Implementasi kebijakan pengelolaan parkir mempunyai berbagai hambatan yang mempengaruhi pelaksanaannya kepada masyarakat. Gow dan Morss dalam Pasolong (2010:59) mengungkapkan hambatan-hambatan tersebut jika dikaitkan dengan hambatan pengelolaan perparkiran di Kota Bukittinggi antara lain:

Dalam Siagian (2007:172), SWOT merupakan akronim dari *Strengths* (kekuatan), *Weakness* (kelemahan) *Opportunities* (Peluang) dan *Threats* (Ancaman). Analisis SWOT digunakan untuk melihat secara menyeluruh, pemerintah daerah atau instansi terkait dapat mengidentifikasi potensi-potensi yang perlu dioptimalkan, serta mengantisipasi tantangan yang mungkin dihadapi dalam upaya penertiban parkir. Hal ini penting untuk merancang strategi yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam menciptakan lingkungan parkir yang lebih tertib kedepannya. Berikut adalah analisis SWOT

untuk strategi Dinas Perhubungan (Dishub) dalam penertiban parkir :

a) *Strenght* (Kekuatan)

Strenght merupakan analisis strategi yang dibuat berdasarkan kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang secara maksimal (Effendi, M., & Mariati, M, 2020). Berdasarkan hasil penelitian yang didapat dapat diketahui Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi telah berupaya melakukan penguatan instansi merujuk pada upaya untuk meningkatkan kapasitas dan efektivitas Dinas Perhubungan (Dishub) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Penegakan Hukum yang Kuat berupa dukungan ukungan dari pihak kepolisian dan regulasi yang jelas memungkinkan Dishub untuk menindak pelanggaran dengan tegas.

Infrastruktur yang memadai membantu dalam pengembangan fasilitas parkir seperti parkir bertingkat dan park and ride membantu mengatasi masalah kapasitas parkir. Menyiapkan SDM yang handal ke lapangan pada petugas parkir serta ASN yang kompeten dan kemampuan yang baik terutama dalam pengelolaan parkir sehingga dapat mengajak dan memberikan edukasi yang efektif membantu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya aturan parkir.

b) *Weakness* (Kelemahan)

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwas Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi selalu melakukan evaluasi kepada para petugas parkir mapun kepada personel secara objektif dan berkelanjutan karena masih ditemui beberapa petugas parkir yang tidak tertib dan personel yang kurang disiplin yang jika terus dibiarkan akan menghambat pelaksanaan penertiban parkir secara optimal.

Peluang masyarakat menggunakan pelanggaran parkir semakin tinggi yang lalu akan menimbulkan ancaman akan adanya pelanggaran parker (Roland et al., 2021). Selain hambatan dari dalam instansi juga terdapat hambatan eksternal yakni masih kurangnya ketersediaan lahan parkir merata di kota bukittinggi, tidak seimbang nya jumlah kendaraan yang ada dengan jumlah titik parkir yang tersedia membuat masyarakat terpaksa untuk memarkirkan kendaraanya pada tempat yang tidak semestinya.

c) *Opportunities* (Peluang)

Strategi yang bersumber dari Weakness dan Opportunities ini merupakan sebuah strategi yang diciptakan dengan meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang (Haryanti et al., 2015). Kemajuan Teknologi Inovasi teknologi seperti aplikasi parkir dan sensor parkir terus berkembang, memberikan peluang untuk sistem parkir yang lebih efisien. Kolaborasi dengan Swasta berupa kerja sama dengan sektor swasta dapat membantu memperluas fasilitas parkir dan meningkatkan layanan Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi sedang berencana dalam menyiapkan hal ini sehingga nantinya terkait pengelolaan perparkiran secara penuh dilimpahkan kepada pihak ketika dan Dinas perhubungan sepenuhnya menjadi pengawas. Dengan regulasi baru yang mendukung penertiban parkir bisa memberikan landasan hukum yang lebih kuat.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Bukittinggi sebagai kota wisata menjadi wilayah yang sering dikunjungi oleh pendatang pada saat hari-hari libur dan akhir pekan, tentu hal ini menjadi ancaman bagi penerapan strategi penertiban parkir yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan. Dalam menanganai ancaman ini Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi melakukan sebuah strategi dengan menambah lokasi titik parkir seta para petugas maupun personil pengawas dilapangan dalam mengatur serta memberikan kepada para pengguna parkir untuk tertib dalam memarkirkan kendaraan.

d) *Threats* (Ancaman)

Pada dasarnya dengan munculnya kelemahan dan ancaman ini dapat mengganggu kelancaran operasional sebuah instansi dalam mencapai tujuannya, hal ini dapat muncul dikarenakan kurangnya koordinasi antar instansi (Kosim, 2021). Hal ini sejalan dengan hasil penelitian ditemukan bahwa Bukittinggi sebagai kota wisata menjadi wilayah yang sering dikunjungi oleh pendatang pada saat hari-hari libur dan akhir pekan, tentu hal ini menjadi ancaman bagi penerapan strategi penertiban parkir yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan.

Dalam Mengatasi ancaman ini Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi melakukan sebuah strategi dengan menambah lokasi titik parkir seta para petugas maupun personil pengawas dilapangan dalam mengatur serta

memberikan kepada para pengguna parkir untuk tertib dalam memarkirkan kendaraan.

Dengan analisis SWOT ini, Dishub dapat menyusun strategi yang lebih komprehensif dan efektif dalam menertibkan parkir, dengan menggunakan peluang serta kekuatan yang dimiliki dalam mengatasi ancaman dan hambatan kedepannya.

PENUTUP

Strategi Dinas Perhubungan dalam penertiban Kota Bukittinggi sudah berjalan dengan menyediakan berbagai fasilitas parkir, melakukan sosialisasi dan himbauana kepada pengguna parkir, serta memerhatikan keberlanjutan strategi berjalan dengan semestinya yakni berupa evaluasi secara berkelanjutan.

Faktor penghambat dalam mengimplementasikan strategi penertiban parkir di Kota Bukittinggi yaitu kurangnya lahan parkir yang memadai, hal ini menyebabkan ketidaktertiban parkir berupa parkir sembarangan, sehingga mengganggu lalu lintas dan ketertiban umum, diikuti dengan rendahnya kesadaran dari masyarakat pengguna parkir untuk tertib memarkirkan kendaraanya sehingga menjadi kebiasaan yang cukup melekat, lemahnya penegakan terkait penertiban parkir oleh Dinas Perhubungan juga terlihat dari adanya petugas parkir yang kurang tertib jika tidak adanya pengawas di lokasi.

Upaya dalam mengatasi permasalahan penertiban perparkiran Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi senantiasa melakukan patroli yang bertujuan untuk membentarkan peringatan kepada masyarakat yang kurang taat serta penguatan pada sdm serta pengawasan petugas parkir yang kurang tertib.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirullah, (2015). *Manajemen Strategi: Teori, Konsep, Kinerja*, (Jakarta: Mitra Wacana Media).
- Budio, Sesra. (2019). *Strategi Manajemen Sekolah*, Jurnal Menata Volume 2, No. 2, Juli-Desember.
- Carolos, R., & Kurniati, P. S. (2021). Analisis Faktor Keamanan Lingkungan Dalam Strategi Dinas Perhubungan Guna Mengatasi Pelanggaran Parkir Di Alun-
Alun Kota Bandung. *JURISMA: Jurnal Riset Bisnis & Manajemen*, 11(1), 64-77.
- Effendi, M., & Mariati, M. (2020). Analisis Strategi Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik. *Jurnal Media Ekonomi (JURMEK)*, 25(1), 1-15.
- Haryanti, N., Warsono, H., & Lestari, H. (2015). Strategi Pengelolaan Perparkiran Di Kota Salatiga. *Journal of Public Policy and Management Review*, 5(1), 136-146.
- Kosim, K. (2021). *Strategi Dinas Perhubungan Dalam Menertibkan Parkir Liar Di Kota Banjarmasin (Doctoral dissertation, Universitas Islam Kalimantan MAB)*.
- Madeleine, C. (2022). *Strategi Penertiban Parkir Liar Oleh Dinas Perhubungan Kota Padang (Doctoral dissertation, Universitas Andalas)*.
- M Wafiq., Esa, S., & Sri, H. (2024). Strategi Dinas Perhubungan Dalam Meningkatkan Pelayanan Parkir Di Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Admistrasi dan Pelayanan Publik*, 11(1), 362-376.
- Satori, Djam'an., dan Aan Komariah. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Alfabeta: Bandung.
- Bambang Sunggono, 1994, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Jakarta: PT Karya Unipress.
- David, F. R. (2010). *Manajemen Strategi : Konsep* Jakarta: Salemba Empat edisi 12.
- Pasolong, Harbani. (2010) *Teori Administrasi Publik*. Bandung, Alfabeta.
- Siagian, Sondang P. 2007. *Manajemen Strategik*. PT. Bumi Aksara. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Perparkiran.